



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN –PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi sebagai Negara Islam
dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri berupa Bantuan
Kemanusiaan terhadap Yaman melalui *King Salman
Humanitarian Aid and Relief Center* pada periode tahun
2015-2020**

Skripsi

Oleh

Raihan Dary Henriana

2013330206

Pembimbing

Sapta Dwikardana, Ph.D

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN –PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi sebagai Negara Islam
dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri berupa Bantuan
Kemanusiaan terhadap Yaman melalui *King Salman
Humanitarian Aid and Relief Center* pada periode tahun
2015-2020**

Skripsi

Oleh

Raihan Dary Henriana

2013330206

Pembimbing

Sapta Dwikardana, Ph.D

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Raihan Dary Henriana
Nomor Pokok : 2013330206
Judul : Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi sebagai Negara Islam dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri berupa Bantuan Kemanusiaan terhadap Yaman melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Center pada periode tahun 2015-2020

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 29 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Sekretaris
Sapta Dwikardana, Ph.D.

: 

Anggota
Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si (Han)

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Raihan Dary Henriana

NPM : 2013330206

Jurusan Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi sebagai Negara Islam dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri berupa Bantuan Kemanusiaan terhadap Yaman melalui *King Salman Humanitarian Aid and Relief Center* pada periode tahun 2015-2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 24 Juli 2020



Raihan Dary Henriana.

ABSTRAK

Nama : Raihan Dary Henriana

NPM : 2013330206

Judul : Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi sebagai Negara Islam dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri berupa Bantuan Kemanusiaan terhadap Yaman melalui *King Salman Humanitarian Aid and Relief Center* pada periode tahun 2015-2020

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai pengelolaan instrumen Ekonomi Islam sebagai instrumen Bantuan Luar Negeri/*foreign aid* oleh sebuah Negara Islam. Yaitu dengan menjelaskan bagaimana Arab Saudi melakukannya melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief) terhadap Yaman. Beragam isu *human security* seperti kemiskinan, kelaparan, dan wabah penyakit senantiasa mendera dunia akhir-akhir ini, sedangkan bantuan kemanusiaan yang tersedia untuk menanggulangnya baru bisa mencukupi kurang dari separuh atas keseluruhan nilai kebutuhan. Selain itu, dalam pemberian bantuan oleh negara-negara pun terdapat banyak isu yang telah lama menjadi penghalang, seperti dominannya motif ekonomi atau politis daripada motif-motif kemanusiaan yang seharusnya melandasi bantuan kemanusiaan sehingga bantuan tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Di sisi lain, Arab Saudi semenjak tahun 1970 senantiasa menjadi negara dengan rasio bantuan luar negeri tertinggi di dunia dari perspektif rasio ODA/GNI (*Official Development Assistance/Gross National Income*)-nya. Selain menjadi negara penyumbang terbesar dari sisi ODA/GNI, bantuan luar negeri Saudi pun terkenal tidak bersifat politis atau ekonomis. Oleh karena itu, Saudi dapat dijadikan model alternatif dalam hal pemberian bantuan luar negeri. Pada tahun 2015, Saudi pun melakukan sentralisasi bantuan luar negeri berupa bantuan kemanusiaan pada satu pada satu badan saja yaitu *King Salman Humanitarian Aid and Relief Center*. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan luar negeri Saudi berupa bantuan kemanusiaan yang diberikan melalui organisasi yang baru terbentuk ini terhadap Yaman sebagai penerima bantuan terbesarnya. Berdasarkan masalah ini, muncullah pertanyaan yaitu “Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi sebagai Negara Islam melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief) dalam mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan instrumen-instrumen Ekonomi Islam untuk keperluan Bantuan Luar Negeri di bidang Humanitarian Aid terhadap Yaman pada periode yang berkisar dari 2015 sejak pembentukan KSRelief hingga bulan Juli tahun 2020?” Dalam meneliti, penulis menggunakan *Maqashid Asy-Syari’ah* untuk menganalisis kebijakan luar negeri Saudi sebagai Negara Islam,

At-Takaful Al-Ijtima'i (jaminan sosial dalam Islam) untuk menganalisis KSRelief, serta *complex emergency* untuk menganalisis konflik Yaman yang menjadi latar penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa Saudi sebagai Negara Islam telah mengaplikasikan ajaran Islam mengenai jaminan sosial secara konsisten dan institusional melalui KSRelief di Yaman sehingga pantas dijadikan model dalam pemberian bantuan luar negeri dan kemanusiaan. Saudi dan KSRelief juga mengaplikasikan bantuan secara holistik sesuai dengan konsep *at-takaful al-ijtima'i* sehingga cocok untuk menjadi model penanganan *complex emergency*.

Kata kunci: Arab Saudi, KSRelief, Kebijakan Luar Negeri, *Maqashid Asy-Syari'ah*, *At-Takaful Al-Ijtima'i*, Jaminan sosial dalam Islam, *Complex Emergency*, Konflik Yaman.

ABSTRACT

Nama : Raihan Dary Henriana

NPM : 2013330206

Judul : Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi sebagai Negara Islam dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri berupa Bantuan Kemanusiaan terhadap Yaman melalui *King Salman Humanitarian Aid and Relief Center* pada periode tahun 2015-2020

The aim of this research is to describe the management of Islamic Economy instruments as a foreign policy instrument by an Islamic Country. This is achieved through describing how Saudi Arabia manages it in Yemen through King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. A variety of human security issues such as poverty, famine, and epidemics have struck the world ceaselessly, while the supply of humanitarian aid required to resolve it doesn't amount to even half of funds needed. Furthermore, the practice of aid-giving by states have had issues that hinders it like the dominance of economic or political motives vis a vis humanitarian motives that should be the underlying motive thus rendering the aids unable to solve the problems. On the other hand, the Kingdom of Saudi Arabia since the 1970s have constantly been the number one country in the world in terms of aid-giving seen from ODA/GNI (Official Development Assistance/Gross National Income) ratio perspective. Apart from being the highest aid giver in terms of ODA/GNI, Saudi's foreign aids have a reputation of not being political or economic in its motives. In 2015, Saudi also centralized its foreign humanitarian aid through King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. Thus, Saudi can be modeled as an alternative in terms of foreign aid giving. Based upon these facts, the author of this research decided to carry a research on Saudi's foreign humanitarian aid practice undertaken by this newly-formed agency towards Yemen as it's biggest aid receiver. Based on these problems, a research question arised that is "how is the foreign policy of Saudi Arabia as an Islamic Country through King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSRelief) in collecting, managing, and administering Islamic Economy instruments as foreign aid in the field of humanitarian aid towards Yemen in the period of 2015 since the establishment of KSRelief until July of 2020?" In carrying out the research, the author uses Maqashid Asy-Syari'ah concept to analyze Saudi's foreign policy as an Islamic State, the concept of At-Takaful Al-Ijtima'i (Islamic social security) to analyze KSRelief, and complex emergency concept to analyze the Yemen Conflict as the setting of the research. Through the research, the author founded that Saudi as an Islamic State have applicated Islamic teaching of social security consistently and institutionally through KSRelief in Yemen. Thus, Saudi is worthy to become a model of foreign and humanitarian aid practice.

Keywords: Saudi Arabia, KSRelief, Foreign Policy, Maqashid Asy-Syari'ah, At-Takaful Al-Ijtima'i, Social security in Islam, Complex Emergency, Yemen Conflict.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur terhadap Allah ﷻ saya ucapkan atas berkat dan rahmat-Nya. Hanya berkat izin-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan ini berjudul Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi sebagai Negara Islam dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri berupa Bantuan Kemanusiaan terhadap Yaman melalui *King Salman Humanitarian Aid and Relief Center* pada periode tahun 2015-2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai pengelolaan model dan instrumen Ekonomi Islam sebagai instrumen Bantuan Luar Negeri/*foreign aid* secara komprehensif. Yaitu dengan menjelaskan bagaimana Arab Saudi sebagai praktik terbaik melakukannya.

Saya berharap penelitian ini akan bisa bermanfaat bagi studi Hubungan Internasional ke depannya. Bagaimanapun, saya menyadari bahwa tulisan ini masih sangat perlu penyempurnaan.

Bandung, 24 Juli 2020

Raihan Dary Henriana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yang tanpa kehadiran, sokongan, dan bantuan mereka skripsi ini mungkin tidak akan selesai.

- Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya yang tidak terhitung, sehingga penulis bisa mendapatkan kemudahan, kekuatan, kesehatan dan kesabaran dalam menulis penelitian ini. Seluruh kebenaran berasal dari-Nya, sedangkan setiap kekeliruan dari kelalaian penulis.
- Untuk Ayah, Ibu, dan seluruh keluarga besar atas dukungannya yang tidak henti-henti serta setiap untaian doa yang telah diberikan untuk kebaikan penulis.
- Dosen Pembimbing, yaitu Mas Sapta Dwikardana, Ph.D. yang telah dengan sabar membimbing, memberikan ilmu-ilmu baru, serta memberi saran-saran yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat, terutama Darma dan Umar yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi.
- Teman-teman HI 2013 yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis sampaikan terima kasih utamanya untuk Fadhil, Bella, dan teman-teman *co-op space* yang selalu mendorong penulis dan menginspirasi.

- Dosen-dosen yang telah banyak sekali memberikan ilmu HI selama penulis berkuliah di HI UNPAR ini. Terutama kepada dosen-dosen yang senantiasa mendorong untuk menyelesaikan studi, yaitu Mbak Ratih, Mbak Anggi, dan Bang Tian.
- Serta untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Juga seluruh pihak yang telah dituliskan di atas, penulis ucapkan *jazakumullahu khairan*. Semoga Allah membalas kalian seluruhnya dengan kebaikan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.2.1 Batasan Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Kajian Literatur.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	19
1.5.1 Kebijakan Luar Negeri (<i>Foreign Policy</i>).....	19
1.5.1.1 KLN sebagai sarana untuk mencapai Kepentingan Negara (<i>National Interest</i>)	19
1.5.3.4 Maqashid Asy-Syariah (tujuan-tujuan umum Syariah) sebagai <i>national interest</i> Negara Islam.....	20

1.5.3.5 Kesimpulan mengenai <i>National Interest</i> Negara Islam.....	24
1.5.4 Bantuan Luar Negeri dalam Islam.....	24
1.5.4.1 Ekonomi Islam.....	25
1.5.4.2 Jaminan Sosial (<i>At-Takaful Al-Ijtima'i</i>).....	27
1.5.4.3 Bantuan Kemanusiaan/ <i>Humanitarian Aid</i>	29
1.5.4.4 <i>At-Takaful Al-Ijtima'i</i> dalam konteks negara.....	29
1.5.4.5 <i>Humanitarian Aid</i>	31
1.5.4.6 <i>Complex Emergency</i>	33
1.5.4.7 Organisasi Islam Internasional.....	33
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
1.6.1 Metode Penelitian.....	35
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	36
1.7 Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II Saudi dan Bantuan Kemanusiaan.....	38
2.1 Saudi.....	39
2.2 Saudi dan Humanitarian Aid.....	43
2.2.1 Motivasi.....	48
2.3 KSRelief, Pilar Baru bagi Bantuan Kemanusiaan di Dunia.....	51
2.3.1 Sejarah dan Tujuan Pendirian.....	51
2.3.2 Dasar dan Prinsip-Prinsip.....	53
2.3.3 Program Internasional.....	57
2.3.4 Saudi Aid Platform.....	57
2.3.5 Penerima Bantuan.....	58
2.3 Saudi dan Yaman.....	60
2.3.3 Latar Belakang <i>Complex Emergency</i> di Yaman.....	60
BAB III Analisis Bantuan Luar Negeri Saudi terhadap Yaman melalui	
KSRelief.....	64
3.1 Bantuan Saudi terhadap Yaman secara umum dan melalui KSRelief.....	64

3.1.1 Besar Bantuan.....	67
3.1.2 Bantuan yang berfokus pada Anak-Anak.....	71
3.1.3 Bantuan yang berfokus pada Perempuan.....	73
3.1.4 Bantuan berkaitan Internally Displaced Person dan Refugees.....	74
3.1.5 Program Lainnya.....	75
3.1.6 Halangan.....	76
3.2 Kesimpulan Bab.....	78
3.2.1 Saudi sebagai Negara Islam yang menggunakan konsep <i>maqashid asy-syari'ah</i> .	78
3.2.2 KSRelief di Yaman.....	80
BAB IV.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Ilustrasi <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i>	22
---	----

Gambar 1. 2: Rancang Bangun Ekonomi Islam.....	26
Gambar 2. 1: Statistik bantuan Saudi periode 1994-2014.....	45
Gambar 2. 2: Statistik ODA/GNI Saudi tahun 2014.....	46
Gambar 2. 3: Perbandingan rasio ODA/GNI negara-negara DAC-OECD.....	47
Gambar 3. 1: Statistik umum bantuan KSRelief.....	58
Gambar 3. 2: Program rehabilitasi <i>child soldiers</i> KSRelief.....	73

DAFTAR TABEL

Gambar 2. 1: Sepuluh negara penerima bantuan terbesar KSRelief.....59

Gambar 3. 1: Rincian proyek KSRelief.....69

DAFTAR SINGKATAN

CERF	:	<i>United Nations Central Humanitarian Response Fund</i>
DAC	:	<i>Development Assistance Committee</i>
DEC	:	<i>United Kingdom Disasters Emergency Committee</i>
DK PBB	:	Dewan Keamanan Persekutuan Bangsa-Bangsa
FAO	:	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GCC	:	<i>Gulf Cooperation Council</i>
GDP	:	<i>Gross Domestic Product</i>
HI	:	Hubungan Internasional
ICRC	:	<i>International Committee of the Red Cross</i>
IDA	:	<i>International Development Aid</i>
IDP	:	<i>Internally Displaced Person</i>
IFRC	:	<i>International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies</i>
IIRISA	:	<i>International Islamic Relief Organization of Saudi Arabia</i>
IMC	:	<i>International Medical Corps</i>
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
IOM	:	<i>International Organization for Migration</i>
INSARAG	:	<i>International Search and Rescue Advisory Group</i>
ISIS	:	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
KLN	:	<i>Kebijakan Luar Negeri</i>
KSA	:	<i>Kingdom of Saudi Arabia</i>
KSRelief	:	<i>King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre</i>
MBS	:	<i>Muhammad bin Salman</i>
MGI	:	<i>McKinsey Global Institute</i>
MOFA	:	<i>Ministry of Foreign Affairs</i>

NGO	:	<i>Non-Governmental Organization</i>
ODA	:	<i>Official Development Assistance</i>
ODA/GNI	:	<i>Official Developmental Assistance/Gross National Income</i>
OECD	:	<i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
OHCHR	:	<i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
OKI	:	Organisasi Kerjasama Islam
UNDAC	:	<i>United Nations Disaster Assessment and Coordination</i>
UNHCR	:	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNOCHA	:	<i>United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs</i>
PBB	:	Persatuan Bangsa-Bangsa
SAMA	:	<i>Saudi Arabian Monetary Agency</i>
SDGs	:	<i>Sustainable Developmental Goals</i>
SFD	:	<i>Saudi Fund for Development</i>
SNC	:	<i>Saudi National Campaign</i>
TDG	:	<i>Top Donors Group</i>
UEA	:	Uni Emirat Arab
UNDP	:	<i>United Nations Development Programme</i>
UNFPA	:	<i>United Nations Population Fund</i>
UNICEF	:	<i>United Nations Children's Fund</i>
UNRWA	:	<i>The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i>
USAID	:	<i>United States Agency for International Development</i>
WFP	:	<i>World Food Programme</i>
WHO	:	<i>World Health Organization</i>
ZISWAF	:	Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca Perang Dingin, muncul isu-isu kemanusiaan yang menjadi fokus dari dunia internasional, setelah sebelumnya didominasi permasalahan tradisional/militeristik. Contohnya pemanasan global, kemiskinan, kelaparan, beragam penyakit dan masalah-masalah lainnya. Karena tingginya urgensi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, PBB dalam Human Development Report tahun 1994 merumuskan konsep *human security*, yang memasukkan tiap-tiap masalah yang mengancam keberlangsungan, penghidupan, dan martabat manusia ke dalam lingkup sekuritas. Ada 7 dimensi esensial dari *human security*, yaitu Ekonomi, Kesehatan, Personal, Politik, Pangan, Lingkungan, dan Komunitas.¹Dari seluruh isu ini, ekonomi termasuk yang terpenting, dan dalam mengatasinya dunia internasional melakukan beragam upaya. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah *foreign aid*, yaitu bantuan dari suatu negara terhadap negara lain.

Namun, pada praktiknya masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam praktik pemberian *foreign aid* ini, seperti keberatan negara penerima bantuan untuk membayar bunga dari hutang yang menyertai bantuan, atau adanya sentimen-sentimen negatif terhadap bantuan yang dianggap sebagai “alat penjajahan baru”. Efektivitas *foreign aid*/bantuan luar negeri yang trennya dimulai

¹ Gomez, Oscar A., and Des Gasper. 2013. Human Security: A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams. United Nations Development Programme, Human Development Report Office.

pasca Perang Dunia II ini pun dipertanyakan, setelah beberapa studi membuktikan bahwa pemberian bantuan ini tidak berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dibutuhkan perbaikan terhadap model *foreign aid* konvensional yang ada, atau ketersediaan alternatif model *foreign aid* lain.

Salah satu alternatif yang memungkinkan adalah dengan menggunakan model dan instrumen-instrumen ekonomi Islam (misalnya Zakat, Sedekah, dan Wakaf), karena potensinya yang besar dan telah teruji selama lebih dari seribu tahun sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, pembangunan, dan bantuan humaniter. Untuk mengkaji instrumen ekonomi Islam sebagai model bantuan luar negeri, dibutuhkan *best practice* yang menjadi acuan agar mudah untuk memahami dan mengaplikasikannya. Oleh karena itu, penulis mengambil Arab Saudi sebagai objek penelitian karena posisinya sebagai salah satu penyumbang terbesar di dunia dengan rasio ODA/GNI sebesar 1.9%, dan komitmennya dalam menjalankan hukum Islam sebagai konstitusi.

1.2 Identifikasi Masalah

Di antara banyaknya ranah bantuan luar negeri seperti pembangunan dan ekonomi, ada satu ranah yang dewasa ini membutuhkan perhatian lebih, yaitu ranah kemanusiaan atau biasa disebut humaniter. Meskipun bantuan humaniter terus meningkat, namun masih belum cukup untuk mengatasi krisis-krisis kemanusiaan yang kian hari terus meningkat. Dibutuhkan sumber-sumber baru dan pendekatan yang lebih baik dalam mengelola dan mendistribusikan dana.

Salah satu sumber dana dan instrumen bantuan luar negeri di bidang

kemanusiaan yang dapat digunakan adalah instrumen-instrumen Ekonomi Islam seperti Zakat, Sedekah, Wakaf. Sebagai contoh dari salah satunya, Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang penggunaannya beragam, termasuk untuk mengatasi krisis-krisis kemanusiaan atau ekonomi. Sekitar 23-57% dari dana Zakat disalurkan untuk keperluan humaniter tiap tahunnya. Selain itu, Zakat adalah amalan agama yang diwajibkan dan dianjurkan untuk setiap individu muslim di seluruh dunia sehingga sumber dananya sangat melimpah.

Sebuah sumber memperkirakan jumlah zakat yang tersedia tiap tahunnya sebesar US\$200 Miliar hingga US\$1 Triliun². Data dari Indonesia, Malaysia, Qatar, Arab Saudi dan Yaman (yang baru mencakup 17% populasi Muslim di seluruh dunia) menunjukkan pemasukan sekitar US\$5.7 Miliar setiap tahunnya melalui institusi zakat formal. Ini belum termasuk potensi informal yang dibayarkan tidak melalui pemerintah. Selain itu jika dilihat dari tingkat penghasilan, Muslim yang bertempat tinggal di Timur Tengah pun memiliki penghasilan lebih besar dari lainnya, sehingga jumlah yang tersedia diperkirakan lebih besar lagi.

Untuk mendapatkan penilaian yang baik terhadap model dan instrumen Ekonomi Islam sebagai instrumen dalam bantuan luar negeri, penelitian ini akan difokuskan pada praktik Ekonomi Islam sebagai instrumen bantuan luar negeri khususnya di bidang kemanusiaan oleh Arab Saudi. Dalam dunia internasional kontemporer, sejak awal berdirinya Saudi merupakan satu-satunya negara yang secara total dan terang-terangan menjadikan hukum Islam sebagai konstitusi, dan

² n.d. A faith-based aid revolution in the Muslim world? Diakses September 20, 2018. www.irinnews.org/report/95564/analysis-a-faith-based-aidrevolution-in-the-muslim-world.

konsisten dalam menjalankannya. Saudi pun merupakan salah satu negara penyumbang terbesar di dunia Islam, bahkan di dunia dengan variabel ODA/GNI sebesar 1.9% sehingga menjadi objek penelitian yang tepat dengan topik ini, sebagai *best practice* dari ekonomi islam di bidang *foreign aid* di dunia pada era modern ini.

Saudi adalah negara GCC yang tertinggi dalam *development and humanitarian assistance* dari segi keterlibatan dan kontribusi. Saudi pun merupakan anggota Top Donors Group (TDG) for Syria dan berpartisipasi dalam forum kerjasama *humanitarian* internasional seperti International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) dan United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) system.

Kementerian Luar Negeri Saudi (MOFA/Ministry of Foreign Affairs) juga menandatangani MoU dengan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) pada 2013 untuk memperkuat koordinasi, mempromosikan pembagian informasi, mengembangkan kesiapan penanganan dan respons terhadap bencana, serta untuk keterlibatan dalam operasi-operasi penanganan bencana bersama.

Kemudian, King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief) pun dibentuk pada 2015 dengan tujuan mengkoordinasikan seluruh aktor negara dan non-negara di dalam KSA, dan menyatukan aktivitas penanganan bencana diluar KSA. KSRelief diharapkan menjadi titik kontak dan referensi untuk aliran

bantuan humaniter nasional Saudi, dengan struktur yang mereproduksi struktur USAID dengan beragam departemen untuk fungsi pengawasan, evaluasi, dan riset.

Sebagai mekanisme pendanaan aktif, Saudi pun memiliki Saudi National Campaign (SNC). Pada setiap krisis humaniter, pemerintah membuat kampanye penggalangan dana. Misalnya, “Kampanye Nasional Saudi Untuk Membantu Saudara-saudari di Suriah” yang berhasil mengumpulkan lebih dari 32 juta Dollar AS hanya dalam beberapa hari dan aktif mendistribusikan makanan, paket berbuka Ramadhan, baju musim dingin, serta selimut-selimut untuk keluarga-keluarga Suriah yang tersingkir karena konflik ke negara-negara tetangga. Selain itu, terdapat pula Saudi Red Crescent (Palang Merah Saudi), International Islamic Relief Organization of Saudi Arabia (IIROSA), dan Alwaleed Philanthropies³. Ini menjadikan Saudi sebagai negara yang menarik untuk dikaji dalam hal isu-isu kemanusiaan dan bantuan luar negeri.

Adapun berkenaan instrumen Ekonomi Islam, penulis pilih untuk dikaji karena dunia internasional kontemporer mengalami banyak permasalahan bencana dan *human security*. Untuk mengatasinya dibutuhkan solusi yang tepat dan terbukti efektif dengan praktek yang telah teruji. Pemanfaatan instrumen-instrumen Ekonomi Islam telah dilakukan sejak masa awal Islam lebih dari 1400 tahun yang lalu, dan pada banyak kasus terbukti mampu menghilangkan kemiskinan. Dana dari ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) pun tersedia sepanjang waktu, tidak hanya pada tahun-tahun tertentu. Oleh karena itu,

³ UNOCHA. n.d. Saudi Arabia. Diakses September 13, 2018. <https://www.unocha.org/middle-east-and-north-africa-romena/saudi-arabia>.

penelitian terhadap Arab Saudi sebagai *best practice* penulis harap dapat berkontribusi terhadap pengembangan praktek *foreign aid* dengan penggunaan instrumen Ekonomi Islam. Bagi negara-negara Islam, kajian ini pun diharapkan dapat menjadi inspirasi agar memperbaiki pengelolaan Zakat dan instrumen ekonomi Islam lainnya di dalam negeri dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, khususnya dalam bidang bantuan luar negeri, dan penanggulangan bencana, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan yang dapat menjadi solusi terhadap isu *human security* di bidang ekonomi dan lainnya.

1.2.1 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini akan difokuskan pada penjelasan deskriptif terhadap pemanfaatan dana dari instrumen-instrumen Ekonomi Islam sebagai instrumen Bantuan Luar Negeri. Objek penelitian adalah Saudi Arabia yang dianggap sebagai praktik terbaik dalam pengelolaan bantuan luar negeri di dunia Islam, dan sebagai negara dengan rasio ODA/GNI terbesar yaitu sebesar 1.9%. Cakupan penelitian ini akan difokuskan pada masa pemerintahan Raja Salman pada Februari 2015 hingga periode tahun 2020 di bulan Juli pada organisasi King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief), lebih rincinya lagi dalam bantuannya terhadap Yaman. Penulis akan meneliti pula dasar hukum dalam Islam yang menjadi dasar dari KSRelief, sumber-sumber dana, dan aplikasinya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Setelah dijabarkan dalam Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi sebagai Negara Islam melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief) dalam mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan instrumen-instrumen Ekonomi Islam untuk keperluan Bantuan Luar Negeri di bidang Humanitarian Aid terhadap Yaman pada periode yang berkisar dari 2015 sejak pembentukan KSRelief hingga bulan Juli tahun 2020?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai pengelolaan instrumen Ekonomi Islam sebagai instrumen Bantuan Luar Negeri/*foreign aid* oleh sebuah Negara Islam. Yaitu dengan menjelaskan bagaimana Arab Saudi melakukannya melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief) terhadap Yaman sebagai penerima bantuan terbesarnya, sehingga dapat menjadi model bagi pengelolaan instrumen Ekonomi Islam dalam ranah bantuan luar negeri di masa yang akan datang. Selain itu, penulis pun berharap dapat mendeskripsikan tentang solusi Islam dalam mengatasi krisis dan isu-isu kemanusiaan lainnya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan mengenai Arab Saudi, KSRelief, dan pandangan Islam dalam memberikan bantuan luar negeri dan menangani krisis kemanusiaan. Penulis juga berharap penelitian ini bisa menginspirasi peneliti-peneliti selanjutnya untuk meneliti bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan dana dari sumber-sumber Ekonomi Islam sebagai instrumen Bantuan Luar Negeri, terutama untuk peneliti dari negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

Selain itu juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu Hubungan Internasional di bidang Bantuan Luar Negeri, dan *human security* khususnya dimensi ekonomi.

Dengan KSRelief sebagai objek penelitian, penulis pun berharap banyak peneliti yang akan berusaha memetakan model dari organisasi tersebut, sehingga banyak yang bisa mendapat manfaat dari *best practice* ini, terutama untuk negara-negara OKI, dan khususnya Indonesia yang pada 2019 baru saja meresmikan badan kemanusiaan bernama IndoAid.

1.4 Kajian Literatur

Kajian pertama penulis adalah mengenai situasi dari bantuan luar negeri di dunia dari perspektif umum.

Foreign aid atau bantuan luar negeri adalah aliran dana dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang dengan tujuan humaniter atau ekonomi. Tren

bantuan luar negeri bermula pasca Perang Dunia II, saat dibutuhkan aliran modal yang besar untuk membangun kembali infrastruktur banyak negara dan juga untuk membujuk suatu negara agar mengikuti ideologi tertentu (Amerika Serikat). Bantuan luar negeri dapat diberikan oleh negara secara langsung, ataupun melalui badan-badan internasional seperti World Bank atau UNHCR. Meski pada prakteknya, banyak diberikan subkontrak kepada ornop-ornop yang berfokus pada bidang bantuan dikarenakan alasan-alasan seperti sulitnya untuk mendistribusikan bantuan secara efektif dan efisien jika dilakukan oleh negara atau organisasi internasional secara langsung.

Dari segi motif, kebanyakan bantuan luar negeri diberikan tidak secara cuma-cuma, namun dalam bentuk pinjaman berbunga atau konsesi bersyarat. Syarat yang diajukan biasanya agar negara penerima mengubah kebijakan ekonominya menjadi lebih terbuka pada perdagangan bebas, mengurangi kontrol harga, dan mengurangi *marginal tax* yang tinggi. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, banyak studi yang menemukan bahwa pemberian *foreign aid* ternyata tidak berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perbaikan kebijakan pemerintah). Menurut Gilbert,⁴ yang berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi adalah *policy environment* di negara tersebut, yang tidak banyak dipengaruhi oleh pinjaman dari luar.

Selain itu, banyak pula permasalahan lain. Dalam distribusi, seringkali bantuan tidak tersampaikan pada warga miskin yang sangat membutuhkan, tapi

⁴ Gilbert, Christopher, Andrew Powell, and David Vines. 1999. "Positioning The World Bank." *The Economic Journal* (Wiley).

justru diterima oleh warga-warga dengan ekonomi kelas menengah. Dari sisi penerima dan penyalur pun terdapat permasalahan yang cukup serius. Penerima bantuan seringkali melakukan lobi terhadap pihak-pihak penyalur bantuan, namun tidak melakukan perubahan kebijakan yang seharusnya ia lakukan ketika dana sudah diterima, atau justru menggunakan dana untuk keperluan lain. Dan penyalur-penyalar berupa agensi-agensi penyalur bantuan pun tidak melaporkan hal ini, karena mereka pun memiliki kepentingan.

Hancock menyebutkan bahwa pihak-pihak ini sebenarnya adalah profesional-profesional kelas menengah yang merupakan bagian dari bisnis internasional besar di bidang “pengentasan kemiskinan”. Mereka berupaya meyakinkan rakyat-rakyat di negara kaya bahwa mereka harus memberikan pinjaman terhadap negara-negara miskin melalui mereka, dan menyeru bahwa pinjaman-pinjaman ini bisa mengentaskan kemiskinan. Padahal, mereka melakukan ini agar bisa mendapat keuntungan sebagai *aid agency*. Mereka disebut dengan “*Lords of Poverty*”⁵.

Jadi ada semacam kesepakatan antara *Lords of Poverty* ini dengan pemerintahan-pemerintahan negara miskin yang sering mangkir dari menjalankan kewajibannya merubah kebijakan. Mereka menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan pemerintahan ini. Meskipun penyusun tidak menemukan studi terbaru mengenai keberadaan *Lords of Poverty* di masa ini, namun ini menunjukkan bahwa di tengah besarnya kebutuhan terhadap bantuan, keberadaan pihak-pihak

⁵ G., Hancock. 1989. *Lords of Poverty: The Power, Prestige, and Corruption of the International Aid Business*. London: Macmillan.

yang bisa menghambat sampainya bantuan tersebut kepada yang membutuhkan adalah suatu kemungkinan yang mungkin terjadi.

Studi statistik terhadap dampak foreign aid terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pun tidak menunjukkan hasil yang memuaskan.⁶ Bahkan sebuah riset yang menghubungkan antara bantuan luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat penghasilan menunjukkan hasilnya seringkali justru negatif.⁷ Survey terhadap studi-studi sejenis pun menyimpulkan tentang adanya skeptisisme bahwa bantuan konsesi memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, atau kualitas lingkungan.⁸

Mengenai motif, literatur pun menyebutkan bahwa ternyata hanya sedikit yang murni untuk memberi bantuan pembangunan. Salah satu yang paling utama adalah kebijakan luar negeri dan hubungan politik. Contohnya, bantuan AS dan Soviet pada masa Perang Dingin ditujukan untuk menggalang dukungan dari negara berkembang. Banyak juga yang memberi bantuan kepada bekas koloninya untuk mempertahankan pengaruh politik. Meskipun selain karena politik, bantuan juga diberikan untuk mengentaskan kemiskinan. Biasanya bantuan diberikan pada negara-negara termiskin dan diatur dalam program seperti International Development Aid (IDA) dari World Bank. Jika pendapatan per kapita negara tersebut sudah naik melewati ambang batas, maka bantuan tidak lagi bersifat non-konsesi. Besar negara juga mempengaruhi motif pemberian bantuan.

⁶ W., Easterly. 2001. *The Elusive Quest for Growth*. Cambridge: MIT Press.

⁷ P., Boone. 1994. "The Impact of Foreign Aid on Savings and Growth." Centre for Economic Performance.

⁸ Lal, Deepak. n.d. *Foreign Aid*. Diakses pada September 20, 2018.
<http://www.econlib.org/library/Enc/ForeignAid.html>.

Selain itu, bantuan bilateral biasanya diberikan untuk menyokong suatu sektor ekonomi tertentu di negara tujuan. Adapun bantuan multilateral tidak serentan itu terhadap tekanan-tekanan politik, namun tidak sepenuhnya imun terhadapnya. Banyak bantuan yang bersyarat, seperti misalnya diwajibkan untuk membeli komoditas tertentu, atau wajib digunakan terhadap suatu hal tertentu yang menyokong kepentingan di negara donor. Pendomplengan syarat ini (atau *tying aid*) dapat mengurangi efektivitas bantuan hingga 15-20 persen. Berdasarkan data historis, biasanya 75 persen dari bantuan AS termasuk *tied aid*, Yunani 70 persen, dan Kanada serta Austria lebih dari 40 persen. Sebaliknya, Irlandia, Norwegia, dan Inggris biasanya tidak melakukan praktik ini.⁹

Oleh karena itu, penulis menilai terdapat beberapa permasalahan dalam *environment* bantuan luar negeri di dunia internasional saat ini, seperti (1) dibutuhkan bantuan luar biasa besar, (2) dana yang disalurkan masih belum mencukupi, masih kurang dari 50%, (3) penyaluran belum efektif, karena adanya kemungkinan kehadiran pihak-pihak semacam *Lords of Poverty*, (4) bantuan belum *sustainable*, (5) kemiskinan tidak hilang, (6) adanya *vested interest* dari pihak-pihak pemberi bantuan, serta (7) dunia berdebat tentang model pengentasan kemiskinan yang *sustainable*, tetapi belum mendapatkannya.

Kemudian, penulis melakukan kajian terhadap sumber-sumber mengenai Saudi, Islam, dan kaitannya dengan bantuan luar negeri.

Kajian kedua yang dilakukan penulis menggunakan sumber publikasi *Briefing Paper* dari *An Act of Faith: Humanitarian Financing and Zakat* yang

⁹ Radelet, Steven. 2006. "A Primer on Foreign Aid." Center for Global Development. Hlm. 4-7

ditulis oleh Chloe Stirk dan dipublikasikan pada Maret 2015. Pada sumber ini, dijelaskan mengenai potensi dana yang besar dari *almsgiving*/sedekah untuk disalurkan dalam ranah kemanusiaan/humaniter, karena setiap agama dan kepercayaan besar di dunia ini memiliki elemen sedekah di dalamnya.

Islam mewajibkan menyalurkan 2,5% dari kelebihan dana yang dimiliki orang-orang berkecukupan yang disebut Zakat. Kristen memiliki anjuran untuk bersedekah dan termasuk bagian esensial dari kekristenan. Judaisme bahkan menetapkan kewajiban menyedekahkan 10% dari total penghasilan yang disebut Tzedakah, dan beberapa literatur Hinduisme menyarankan memberikan jumlah yang sama untuk bersedekah.

Berdasarkan riset, pada tahun 2013 dana sedekah yang diterima dari organisasi berbasis kepercayaan bernilai antara US\$420-434 Juta, yaitu sekitar 15-16% dari total bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui organisasi non-pemerintah. Sekitar 11-16% dari dari *NGO* yang terdaftar di UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) sebagai penerima bantuan kemanusiaan secara eksplisit mengidentifikasi dirinya sebagai organisasi berbasis agama atau kepercayaan tertentu. Begitu pula dengan 7 dari 22 *NGO* yang menjadi dewan di *Core Humanitarian Standard*, dan 5 dari 13 *NGO* yang tergabung di *UK Disasters Emergency Committee* (DEC).

Di antara aktor-aktor penyumbang sedekah ini, negara-negara Islam (negara yang menerapkan hukum Islam secara eksplisit) atau negara mayoritas Muslim (negara dengan mayoritas penduduk Muslim, meskipun tidak secara

eksplisit menerapkan hukum Islam) mengalami peningkatan signifikan dari segi jumlah dana yang disalurkan ke seluruh dunia. Pada periode antara 2011 dan 2013, bantuan kemanusiaan internasional (*international humanitarian assistance*) dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berkembang dari US\$599 Juta menjadi US\$2.2 Miliar, yang mewakili 14% dari jumlah bantuan pemerintah di seluruh dunia.

Selain itu, 75% dari penduduk yang tinggal di 10 negara teratas penerima bantuan kemanusiaan pada 2013 pun adalah Muslim.¹⁰ Dana sumbangan negara-negara OKI ini sebagian besarnya berasal dari Zakat, yang merupakan sedekah wajib bagi umat Islam yang berkecukupan. Menurut sebuah riset, Zakat dari Indonesia, Malaysia, Qatar, Arab Saudi, dan Yaman (yang mencakup 17% dari populasi seluruh Muslim di dunia) mencapai angka US\$5.7 Miliar. Maka setidaknya, potensi Zakat dari seluruh Muslim dapat mencapai minimal puluhan miliar Dollar AS.

Ini adalah Zakat yang dikumpulkan melalui badan-badan formal seperti pemerintah dan organisasi-organisasi pengumpul Zakat. Jika digabungkan dengan Zakat yang disumbangkan secara informal, maka jumlahnya akan menjadi lebih besar lagi mengingat banyak orang yang lebih memilih memberikan Zakatnya secara langsung pada orang-orang miskin.

Sebagai perbandingan, bantuan kemanusiaan internasional dari pemerintah-pemerintah dan donor pribadi pada 2013 nilai totalnya US\$22 Miliar.

¹⁰ Stirk, Chloe. 2015. "An Act of Faith: Humanitarian financing and Zakat." Global Humanitarian Assistance.

Sedangkan *Official Development Assistance* (ODA) dari negara-negara anggota *Development Assistance Committee* (DAC) *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) terhitung sebanyak US\$134.8 Miliar pada tahun yang sama. Oleh karena itu pembahasan mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi Zakat sangat dibutuhkan di tengah tingginya kebutuhan terhadap dana bantuan kemanusiaan.

Kajian ketiga, dari buku *From Charity to Change: Trends In Arab Philanthropy*, pada bagian *The Kingdom of Saudi Arabia*. Pada literatur ini, dijelaskan bahwa Arab Saudi sejak masa pra-Islam telah terkenal dengan budaya bersedekahnya, terutama bagi penduduk di sekitar Makkah yang telah menjadi tujuan haji masa Nabi Ibrahim 'Alaihissalam, lebih dari 1000 tahun sebelum Islam. Sejak dahulu, masyarakat di sekitar Ka'bah selalu berlomba satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dari jemaah yang menunaikan haji, terutama makan serta minum mereka. Mereka menganggap bahwa semakin dermawan seseorang, maka semakin mulia-lah orang tersebut, dan bahkan suku-suku saling berperang untuk mendapatkan porsi terbesar dalam melayani Jemaah haji ini.

Budaya ini terbawa pada Saudi di masa kini, yang kini menjadi penjaga dari dua Kota Suci (Makkah dan Madinah) dan menjadi salah satu penyumbang terbesar di seluruh dunia, jika dilihat dari rasio antara ODA (*Official Development Assistance*) dengan GNI negara tersebut.

Jadi, Sedekah telah menjadi kebiasaan dan kebudayaan di daerah Arab terutama sekitar Makkah yang di masa modern kini menjadi Saudi Arabia, jauh

sebelum Islam kemudian datang dan mengorganisasikannya dalam syariat. Dengan bergabungnya suku-suku pada 1932 di bawah Raja Abdul Aziz bin Saud dan ditemukannya cadangan minyak pada 1938, kapasitas Arab Saudi untuk bersedekah bertambah besar.¹¹ Di Arab Saudi, sedekah pun telah menjadi sesuatu yang bersifat publik sekaligus meresap di kehidupan sehari-hari.

Banyak penjelasan bagi kedermawanan ini, dari mulai karena keberadaan dua kota suci Mekkah dan Madinah yang membawa budaya memberi pada tamu-tamu asing dan kemudian berkembang menjadi budaya, karena sejarah Saudi Arabia yang belum pernah mengalami penjajahan, karena ini merupakan perintah agama, dan juga karena karakteristik kedermawanan Arab Badui. Namun yang menarik, bahwa budaya sedekah di Saudi tidak sekedar sebuah upaya memberi yang termotivasi oleh agama, tetapi pemberian ini pun didukung oleh infrastruktur dan yayasan-yayasan yang menyalurkannya pada jalur-jalur pemberian yang diatur dalam Al-Qur'an seperti membantu orang miskin, janda-janda, anak-anak yatim, orang-orang sakit, dan lainnya.

Kini tren sedekah itu pun mulai diarahkan pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable development*). Misalnya, ada sebuah sesi Dialog Nasional yang disiarkan di televisi, yang membicarakan tentang masalah-masalah urgen negara dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengeluarkan dana pribadinya untuk mengatasi masalah-masalah ini.¹²

¹¹ The John D. Gerhart Center for Philanthropy and Civic Engagement. 2008. *From Charity to Change: Trends in Arab Philanthropy*. Cairo: The American University in Cairo. hlm. 87

¹² *Ibid.*, hlm. 94

Di Saudi, secara garis besar upaya-upaya filantropis disalurkan melalui lima jenis institusi filantropis, yaitu

1. Organisasi filantropis korporat
2. Asosiasi-asosiasi yang ditunjuk oleh Kerajaan
3. Asosiasi dan lembaga-lembaga yang dibawahhi Kementerian Tenaga Kerja dan Isu Sosial
4. Asosiasi dan lembaga-lembaga di bawah kementerian lain
5. Institusi filantropis internasional.

Corporate giving pun lazim ditemukan di Saudi, dan dalam pemberian-pemberiannya biasanya lebih sistematis seperti melalui program tertentu, baik dalam bentuk *CSR* ataupun penyaluran zakat dari hasil penjualan dan lainnya.¹³Jadi, sedekah telah menjadi budaya yang mengakar kuat di Saudi, serta terinstitusionalisasi dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Yang penting untuk disorot dari Saudi adalah adanya budaya memberi, yang diinstitusionalisasi dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan, diiringi penyaluran secara berkelanjutan dan berfokus pada pembangunan. Proses ini berada pada lingkup yang menyeluruh, dari mulai *social security net* yang memberi dana segar untuk kebutuhan segera, hingga pembangunan jangka panjang.

¹³ Ibid., hlm. 96

Terakhir, berkaitan situasi terkini bantuan luar negeri Saudi penulis menemukan data-data dari Kementerian Luar Negeri Saudi serta KSRelief yang menunjukkan bahwa Saudi memberikan bantuan sangat besar terhadap Yaman, terutama setelah dimulainya konflik antara pasukan Koalisi negara-negara GCC dengan milisi Syiah Hutsi. Selain bantuan berupa dana hingga miliaran Dollar AS, Saudi juga membantu Yaman secara rutin dengan bantuan berupa makanan, obat-obatan, pendidikan, hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang direkrut oleh Hutsi menjadi tentara.

Data yang disebutkan juga selaras dengan yang dijelaskan oleh PBB mengenai bantuan Saudi terhadap Yaman. Data dari Kementerian Luar Negeri Saudi juga menunjukkan perspektif yang sering luput dari media, yaitu bahwa perang melawan milisi Hutsi bukan merupakan bentuk invasi terhadap Yaman, namun merupakan intervensi atas permohonan bantuan dari Presiden Yaman yang stabilitas negaranya mengalami kekacauan karena pemberontakan Hutsi yang didukung oleh Iran. Selain Yaman, Saudi juga sangat aktif dalam memberikan bantuan terhadap banyak negara di dunia baik secara bilateral maupun melalui organisasi-organisasi internasional.

Berdasarkan kajian-kajian ini, penulis berkesimpulan bahwa bantuan kemanusiaan berbasis atau bersumber dari nilai-nilai agama dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan bantuan kemanusiaan yang sekarang sangat dibutuhkan oleh dunia. Selain itu, Saudi juga sangat cocok untuk diteliti sebagai perwakilan dari negara Islam yang memiliki sejarah dan kultur yang sangat dekat dengan bantuan kemanusiaan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*)

Jean Frederic Morin dan Jonathan Paquin dalam bukunya *Foreign Policy Analysis: A Toolbox* memaparkan bahwa Kebijakan Luar Negeri tidak terbatas pada satu definisi saja dan dapat mencakup banyak hal dari mulai aturan, tindakan, nir-tindakan, konsepsi/doktrin, keputusan, hingga deklarasi-deklarasi. Namun, persamaan di antara semuanya adalah bahwa *KLN dilakukan oleh aktor negara berdaulat dan memiliki efek ke luar negara tersebut*. Ia juga menambahkan bahwa untuk memahami dan menjelaskan sebuah kebijakan luar negeri, peneliti harus mempelajari dinamika domestik dan proses-proses pengambilan keputusan dalam negara tersebut (Sprout and Sprout 1965).¹⁴

Oleh karena itu, bantuan luar negeri termasuk ke dalam Kebijakan Luar Negeri, dan untuk menelitinya harus pula mendalami kondisi domestik negara tersebut yang menjadi latar terbitnya kebijakan tersebut.

1.5.1.1 KLN sebagai sarana untuk mencapai Kepentingan Negara (*National Interest*)

Menurut Bojang AS, Kebijakan Luar Negeri (KLN) tidak bisa dipisahkan dari kepentingan negara (*National Interest*), karena KLN adalah salah satu instrumen utama negara dalam upaya mencapai kepentingannya. Dalam abstrak papernya, Bojang juga mengatakan bahwa pengambilan keputusan KLN

¹⁴ Jean Frederick Morin dan Jonathan Paquin, *Foreign Policy Analysis: A Toolbox* (Quebec: Palgrave Macmillan, 2018), hal. 2-3

disepakati sebagai salah satu instrumen terbesar negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.¹⁵

Berdasarkan paparan Bojang, bantuan luar negeri sebagai KLN harus dilihat sebagai instrument untuk mencapai kepentingan negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa kepentingan negara dari negara yang diteliti.

1.5.3.4 Maqashid Asy-Syariah (tujuan-tujuan umum Syariah) sebagai *national interest* Negara Islam

Salah satu pendekatan utama dalam meneliti kebijakan luar negeri adalah dengan memandang negara sebagai sebuah aktor rasional (*rational actor*) yang memandang suatu permasalahan dan mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan untung-rugi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Negara Islam juga adalah aktor rasional? Atau membutuhkan suatu pendekatan yang sama sekali lain untuk mengetahui motivasi-motivasinya?

Misalnya, dijelaskan bahwa tujuan utama negara Islam adalah menegakkan agama, apakah ini menjadikannya tidak rasional? Untuk memahami hal ini, maka perlu memahami motif dan tujuan-tujuan utama dari syariat itu sendiri yang dinamakan oleh para Ulama dengan *Maqashid Asy-Syariah* (maksud-maksud/tujuan-tujuan syariah).

Prof. Dr. Muhammad Munir, Direktur dari Akademi Syariah Umum *International Islamic University Islamabad* menjelaskan bahwa implementasi

¹⁵ *Ibid.*, hal. 1

syariah (juga tindakan-tindakan negara Islam) didorong oleh *mashalih* (bentuk plural dari *maslahat*). Makna dari maslahat adalah mencari kebaikan dan menolak keburukan. Hukum Islam diturunkan untuk menjaga kebaikan-kebaikan dan menyokong kemajuan serta penyempurnaan dari kondisi hidup manusia di dunia. Para Ulama menklasifikasikan maslahat menjadi tiga, yaitu *darurat* (kebutuhan vital/*necessary interests*), *hajiyyat* (kebutuhan penyokong/*supporting interests* yang menyokong kebutuhan vital), dan *tahsinat* (kebutuhan pelengkap/*complementary interests*). Islam menjaga masing-masing dari kebutuhan ini secara internal dan juga eksternal. Imam atau kepala negara (*Muslim head of state*) memiliki tugas untuk menjaga kondisi yang ideal dalam penjagaan internal dan eksternal dari kebutuhan-kebutuhan ini.

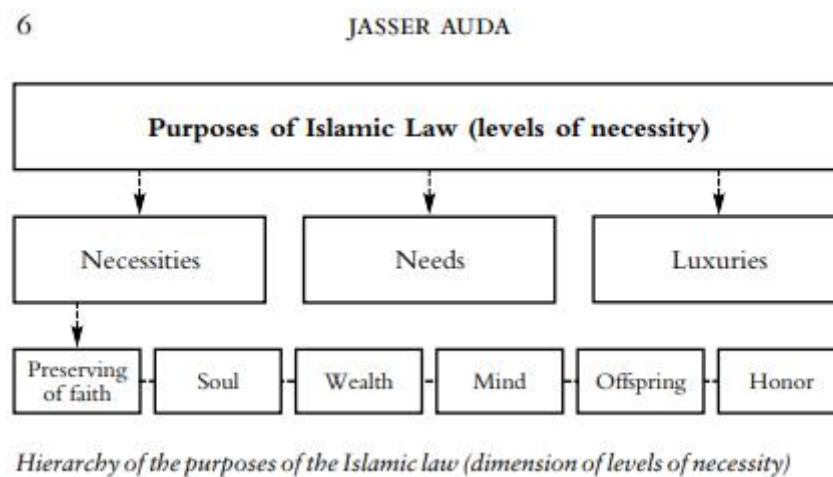
Kebutuhan vital atau *darurat* adalah kebutuhan-kebutuhan yang jika tidak dijaga maka masyarakat akan mengalami anarki dan kekacauan. Jika kebutuhan-kebutuhan vital ini kolaps, maka kehidupan normal pun akan kolaps. Kebutuhan *darurat* (plural dari *darurah*) ini ada lima, yaitu: agama (diin), nyawa (nafs), keturunan (nasl), akal (aql), dan kekayaan/harta (maal). Ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang hilang dalam *crisis context* sehingga negara yang menderitanya kemudian membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Menurut Muhammad Munir, setiap negara Muslim (*Muslim state*) berkewajiban untuk menjaga dan melindungi seluruh tujuan-tujuan syariah (*maqashid asy-syariah*) ini. Ketiga tingkatan ini (*darurat, hajiyyat, tahsinat*) juga bermakna tingkatan prioritas. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan yang

bersifat *darurat* didahulukan daripada *hajiyyat* yang bersifat mendukung, serta *tahsinat* yang merupakan penyempurna.¹⁶

Mohammad Hashim Kamali juga memberikan penjelasan tambahan akan hal ini: “Jika ada kepentingan-kepentingan yang saling berkonflik dan tidak diketahui secara jelas kepentingan mana yang lebih baik, maka menjauhi keburukan (*mudharat*) diprioritaskan daripada menggapai maslahat. Karena, syariat memiliki penekanan lebih pada perintah menjauhi larangan.”¹⁷ Hashim juga menjelaskan bahwa hukum-hukum syariat itu adalah realisasi dari maslahat, yang merupakan sintesa/*summa* dari *maqashid*.¹⁸

Gambar 1.1 Ilustrasi *Maqashid Asy-Syari’ah*



Sumber: Jasser Auda, *Maqashid Asy-Syari’ah a Beginner’s Guide* (London: The International Institute for Islamic Thought 2008), hal. 6

¹⁶ Muhammad Munir. “Shariah and the Nation-State: The Transformation of Maqasid Al-Shari’ah Theory”. *Hazara Islamicus* 6, no. 2 (2017): 2

¹⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shari’ah Made Simple* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hal. 5

¹⁸ *Ibid.*, hal. 3

Berdasarkan pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa negara Islam juga merupakan aktor rasional, yang mengambil keputusan berdasarkan “untung-rugi”. Namun, ada perbedaan mendasar, yaitu bagi negara Islam yang menjadikan syariat sebagai dasarnya, yaitu untung-rugi ini dinilai dengan konsep berusaha menggapai *maslahat* (kebaikan-kebaikan) dan menjauhi *mudharat* (keburukan). Definisi dari kebaikan dan keburukan tersebut terambil dari syariat yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, bukan semata pertimbangan ekonomis atau semisalnya. Inti dari kebaikan yang harus dijaga dalam syariat adalah 5 hal, yaitu agama sebagai prioritas tertinggi, kemudian diikuti dengan nyawa, keturunan, akal, dan terakhir adalah harta. Kemudian, ada hal-hal sekunder dan tersier yang mengikutinya, namun semuanya kembali pada penjagaan terhadap 5 kebutuhan ini. Kemudian, jika ada kepentingan yang berkonflik, maka yang lebih utama didahulukan dari yang lainnya, dan menghindari keburukan didahulukan dari menggapai kebaikan. Ini adalah *framework* berpikir dari negara Islam.

Contoh aplikasinya, adalah bahwa menjaga nyawa lebih diprioritaskan daripada menjaga harta, sehingga kehilangan harta lebih ringan bagi sebuah negara Islam daripada kehilangan nyawa. Kemudian, kehilangan nyawa lebih ringan daripada kehilangan agama.

Kemudian, dari frasa Hashim bahwa “hukum-hukum syariat itu adalah realisasi dari *maslahat* yang merupakan *summa* dari *maqashid*”, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan negara adalah realisasi dari mencari *maslahat* dan menghindari *mudharat* yang berdasarkan pada aturan agama.

1.5.3.5 Kesimpulan mengenai *National Interest* Negara Islam

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa termasuk *national interest* dari Negara Islam adalah penjagaan terhadap Maqashid Asy-Syariah sebagaimana yang dikemukakan oleh Professor Muhammad Munir. Sehingga, kedua konsep ini dapat dijadikan patokan dalam meneliti Negara Islam. Ini senada juga dengan yang dikemukakan oleh Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. bahwa “misi hubungan internasional Islam dalam teori politik Islam adalah membangun kebaikan (maslahat) dan keadilan sesuai dengan petunjuk wahyu.”. Ia juga menyatakan bahwa “semua aktivitas aktor hubungan internasional harus dibimbing oleh nilai atau pertimbangan normative (dalil syariat). Semua tujuan praktisnya harus diorientasikan pada konsepsi tujuan agung manusia, dalam hal ini adalah kemaslahatan (*mashalih*). Memahami dan analisis istilah-istilah politik hubungan internasional tetap harus mengacu pada nilai dan/atau pertimbangan normative dalil agama secara objektif.¹⁹

1.5.4 Bantuan Luar Negeri dalam Islam

Untuk menjelaskan mengenai bantuan luar negeri Saudi ke Yaman, maka penulis akan menggunakan konsep *foreign aid* (bantuan luar negeri) untuk menjelaskan bantuan luar negeri secara umum sebagai bantuan dari satu negara ke

¹⁹ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 40-41.

negara lainnya. Secara khusus, penulis akan menggunakan konsep Ekonomi Islam dan *Takaful Ijtima'I* (solidaritas sosial) untuk menjelaskan instrumen, prinsip-prinsip, dan pemberian bantuan dalam Islam. Ini dilakukan untuk menjelaskan Kebijakan Luar Negeri Saudi berupa bantuan luar negeri ke Yaman dalam konteksnya sebagai KLN sebuah Negara Islam. Penulis akan berusaha menjelaskannya secara kualitatif dengan berfokus pada sumber doktrin dan implementasinya secara umum, karena untuk menjelaskan bantuan tersebut secara statistik dengan indikator-indikator bantuan luar negeri seperti dari UNOCHA, misalnya, akan membutuhkan riset tersendiri.

Kemudian, untuk menjelaskan mengenai KSRelief, penulis akan menggunakan konsep *humanitarian aid*, *aid agency*, dan organisasi Islam.

1.5.4.1 Ekonomi Islam

Sebelum masuk ke ranah bantuan, maka kita harus terlebih dahulu memahami Ekonomi Islam secara global. Karena, bantuan sosial adalah salah satu sub bahasan dari Ekonomi Islam.

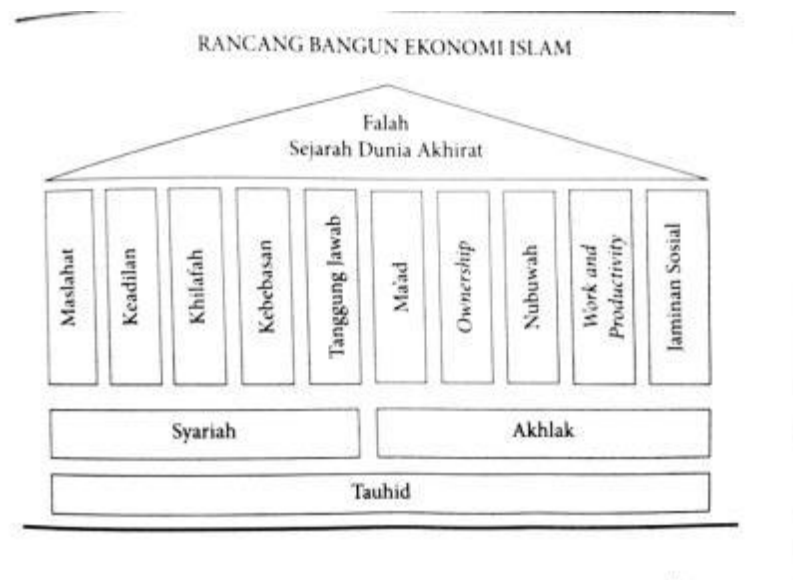
Definisi dan Karakteristik

Perbedaan utama antara sistem Ekonomi Islam dengan lainnya adalah pada falsafah yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber dari Al-Qur'an dan hadits berupa prinsip-prinsip universal.

Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada sebab dan akibat dari suatu kegiatan ekonomi, namun juga pada nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut.

Selayaknya bangunan, maka sistem Ekonomi Islam juga bisa diibaratkan memiliki pondasi, tiang-tiang, dan atap (sebagai tujuannya).

Gambar 1.2: Rancang bangun Ekonomi Islam



Sumber: Veithal Rivai et al., *Islamic Business and Economic Ethics Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, hal.

Pondasi yang paling bawah dan menjadi penopang seluruhnya adalah Tauhid. Pondasi berikutnya adalah syariah dan akhlak sebagai refleksi dari

Tauhid.²⁰ Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam negara Islam, kegiatan ekonominya pun dilandaskan pada agama, sehingga kegiatan ekonomi pun, baik domestik maupun internasional, tidak terlepas dari konsideran ini.

1.5.4.2 Jaminan Sosial (*At-Takaful Al-Ijtima'i*)

Dalam Ekonomi Islam, ada satu konsep turunan yang membahas secara khusus mengenai pemberian bantuan dan pengatasan kemiskinan, karena Islam memandang kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi. Salah satu upaya tersebut bernama *At-Takaful Al-Ijtima'i* atau jaminan sosial.

Jaminan Sosial dalam Islam memiliki definisi sebagai berikut, “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka”.

Takaful merupakan prinsip baku dalam Ekonomi Islam yang bersandarkan kepada asas akidah (keyakinan) dan kaidah akhlak, tidak didasarkan pada respon terhadap tekanan kemanusiaan dan perekonomian saja. Takaful merupakan tanggung jawab dari masing-masing Individu, Masyarakat, dan Pemerintah (negara).

²⁰ Veithal Rivai et al., *Islamic Business and Economic Ethics Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 50-51.

Bantuan sosial diberikan kepada semua yang membutuhkan dan kalangan rakyat yang terdapat di negara Islam secara khusus dan selainnya secara umum. Termasuk yang paling utama adalah Fakir dan Miskin (Fakir dan Miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya), janda dan anak yatim, orang sakit dan orang lumpuh, *ibnu sabil* (musafir yang melintasi satu daerah ke daerah lain, termasuk ke dalamnya *refugee* atau *internally displaced person*), hingga anak temuan (anak yang ditemukan tanpa orang tua atau wali) dan *ahli dzimmah* (warga negara non-Muslim yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam).

Di luar dari penerima di daftar di atas, bantuan yang diberikan kaum Muslimin terhadap orang lain tidak ada keterikatan terhadap ras tertentu dan bangsa itu sendiri. Bantuan yang diberikan kaum Muslimin mencakup semua manusia, termasuk di dalamnya non-Muslim yang memiliki ideologi yang berbeda sekali dengan akidah kaum Muslimin. Bahkan dalam situasi tertentu tidak terlarang memberikan bantuan kepada musuh yang sedang memerangi.

Secara umum, *at-takaful al-ijtima'i* dapat dipahami sebagai jaminan sosial yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dari pemerintah, individu, dan masyarakat.
2. Diberikan kepada setiap yang membutuhkan, khususnya di dalam negara dan secara umum di luar negara.
3. Bantuan mencakup untuk semua manusia tanpa batasan ras atau bangsa.

1.5.4.3 Bantuan Kemanusiaan/*Humanitarian Aid*

Bantuan kemanusiaan dalam *crisis context*, yaitu pertolongan dan bantuan yang diberikan kepada setiap jiwa manusia dalam berbagai bencana, malapetaka, dan musibah dengan menggunakan segala sarana yang dimiliki sehingga orang yang terdampak bisa hidup normal kembali, adalah bagian atau *sub* dari konsep *takaful*. Dalam dunia Islam, bantuan kemanusiaan biasa disebut dengan *Al-Istighotsah*. Secara bahasa, *istighotsah* bermakna permohonan bantuan ketika tertimpa musibah untuk dapat keluar darinya.²¹

Berdasarkan paparan ini, maka dapat disimpulkan bahwa negara Islam memiliki mekanisme dalam mengatasi isu-isu *human security* seperti kemiskinan, pengungsi dan *internally displaced person*, anak-anak dan wanita, serta lainnya, dalam kerangka jaminan sosial yang disebut *at-takaful al-ijtima'i*. Bantuan ini juga tidak terbatas hanya kepada Muslim, namun juga pada non-Muslim dan tidak terbatas oleh batas negara. Dalam aplikasinya, *Humanitarian aid* yang dikenal di dunia internasional termasuk dalam konsep *takaful*.

1.5.4.4 *At-Takaful Al-Ijtima'i* dalam konteks negara

Dalam konteks bantuan yang diberikan oleh negara, dikenal bantuan luar negeri, bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*), dan sebagainya.

²¹ Raghil As-Sirjani, *Ruhama'u Bainahum* terjemah Ali Nurdin (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 7-9.

Foreign Aid atau bantuan luar negeri didapati dari *Development Assistance Committee* (DAC) dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah aliran finansial, bantuan teknis, dan komoditas yang (1) didesain untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sebagai tujuan utamanya (dengan ini tidak termasuk ke dalamnya bantuan militer atau yang bertujuan non-pembangunan lainnya), dan (2) diberikan dalam bentuk hibah atau pinjaman bersubsidi.

DAC mengklasifikasikan aliran bantuan menjadi 3: *Official Development Assistance* (ODA) adalah yang terbesar, yaitu bantuan dari pemerintahan-pemerintahan donor kepada negara berpenghasilan menengah-rendah. *Official Assistance* (OA) diberikan pemerintah kepada negara dengan penghasilan yang lebih besar dari negara penerima ODA, yaitu sekitar lebih dari \$9000 per kapita (misalnya bantuan untuk negara-negara kepulauan Bahama, Cyprus, Israel, dan Singapura) dan kepada negara-negara yang dulunya tergabung pada USSR atau negara satelitnya. Yang ketiga, *Private Voluntary Assistance* yaitu yang termasuk di dalamnya hibah dari organisasi-organisasi non-pemerintah, kelompok-kelompok religius, *charities* (sedekah), yayasan, dan perusahaan-perusahaan swasta.

Bantuan luar negeri kebanyakannya diberikan sebagai bantuan bilateral (*bilateral assistance*) dari satu negara ke negara lainnya. Donor juga bisa menyediakan bantuan secara tidak langsung melalui *multilateral assistance*, yang mengumpulkan bantuan dari beberapa donor. Institusi multilateral yang besar adalah seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), African, Asian,

and Inter-American Development Banks, dan bermacam agensi dari PBB seperti United Nations Development Programme (UNDP).

Bantuan biasanya dihitung dengan tiga parameter, yaitu: dengan dollar AS; sebagai persentase dari GDP, atau; per kapita. Setiap parameter mengungkap hal yang berbeda. Salah satu parameter untuk mengukur bantuan negara adalah ODA/GNI, yaitu persentase dari bantuan luar negeri terhadap GNI negara tersebut. Sebuah negara bisa saja memberikan *aid* yang besar, namun ternyata jika dipersentasikan jumlahnya kecil dibandingkan GNI-nya.

Jika dilihat dari pembahasan ini, motif dari bantuan biasanya memiliki motif tertentu yang bersifat politis. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *at-takaful al-ijtima'i* yang menjelaskan bahwa bantuan diberikan tanpa motif tersebut. Penulis akan meneliti apakah bantuan Saudi sesuai dengan konsep *at-takaful al-ijtima'i* atau dengan bantuan-bantuan konvensional yang bermotif politis.

1.5.4.5 Humanitarian Aid

Konsep *istighatshah* dalam *at-takaful al-ijtima'i* memiliki kemiripan dengan konsep *humanitarian aid* yang berkembang. Dalam publikasi WHO, *humanitarian aid* dijelaskan dengan istilah *humanitarian assistance* (bantuan kemanusiaan) yaitu “Bantuan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mengangkat penderitaan dari populasi yang terdampak krisis. Bantuan kemanusiaan harus diberikan dengan merujuk pada prinsip-prinsip kemanusiaan

dasar (*basic humanitarian principles*) yaitu kemanusiaan (*humanity*), imparsialitas (*impartiality*), dan netralitas (*neutrality*) sebagaimana termaktub dalam Resolusi Dewan PBB nomor 46/182. Sebagai tambahan, PBB berupaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan dengan penghargaan penuh terhadap kedaulatan negara-negara. Bantuan bisa dibagi menjadi tiga kategori: bantuan langsung (*direct assistance*), bantuan tidak langsung (*indirect assistance*), dan sokongan infrastruktur (*infrastructure support*). Ketiganya sesuai urutan memiliki derajat kontak yang semakin berkurang antara pemberi dengan populasi yang terdampak (OCHA).”

Bantuan (*assistance*) memiliki definisi sebagai “bantuan (*aid*) yang diberikan untuk mengatasi kebutuhan fisik, material, dan legal dari orang-orang yang menjadi perhatian. Bantuan ini bisa berupa makanan, suplai medis, pakaian, tempat berlindung, biji-bijian dan alat-alat pertanian, juga bantuan infrastruktur seperti sekolah dan pembangunan jalan. Adapun *humanitarian assistance* mengacu pada bantuan yang diberikan oleh *organisasi kemanusiaan (humanitarian organization)* untuk *tujuan kemanusiaan* (non-politis, non-komersial, dan non-militer).²²

²² ReliefWeb, *Glossary of Humanitarian Terms* (2008), <https://www.who.int/hac/about/reliefweb-aug2008.pdf?ua=1>

1.5.4.6 *Complex Emergency*

Terkadang, krisis kemanusiaan di suatu daerah bersifat kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang kompleks pula. Krisis seperti ini dinamakan *complex emergency*, yaitu sebuah krisis kemanusiaan yang beraneka segi di suatu negara, daerah, atau masyarakat ketika ia otoritasnya mengalami kemogokan (*breakdown*) cukup besar atau bahkan total sebagai hasil dari konflik internal atau eksternal sehingga membutuhkan respons yang bersifat internasional dan multisektor yang melampaui mandat atau kapasitas dari suatu agensi tunggal dan program PBB yang sedang berjalan. Keadaan darurat ini, secara khusus, memiliki efek yang menghancurkan (*devastating effect*) terhadap anak-anak dan wanita serta membutuhkan respons dengan rentang yang kompleks.²³ Maka, *complex emergency* adalah satu kondisi ketika kebutuhan-kebutuhan *darurat* dalam *maqashid asy-syari'ah* terancam atau bahkan hilang.

1.5.4.7 Organisasi Islam Internasional

Untuk meneliti KSRelief, maka kita harus memahami konsep *aid agency*, dan *foreign aid agency*, serta perbedaan antara organisasi *aid* Islam dengan lainnya.

Aid agency atau agensi bantuan adalah organisasi yang menyediakan dana, makanan, obat-obatan, atau suplai-suplai lain untuk membantu orang-orang atau

²³ *Loc. Cit.*

negara-negara yang sedang menderita.²⁴ Adapun *foreign aid agency* atau agensi bantuan luar negeri adalah agensi yang target penerima bantuannya berada di luar konstituensi dari donornya, yang biasanya berada di negara-negara berkembang.

Kemudian, pandangan Islam tentang organisasi. Dalam Islam, membuat organisasi masuk pada perkara muamalah (hubungan antar manusia) yang pada dasarnya bersifat *mubah* (diperbolehkan). Membuat organisasi, yayasan, dan yang semisalnya adalah diperbolehkan selama aktivitas-aktivitasnya dalam rangka menolong, membela, dan mendukung kebenaran. Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *grand mufti* Arab Saudi periode 1993-1999 juga menyatakan bahwa jika organisasi dibangun dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan takwa antar sesama muslim tanpa diselipi hawa nafsu, maka hal tersebut adalah sebuah kebaikan dan keberkahan serta manfaatnya sangat besar. Syaikh Nashiruddin Al-Albani yang pandangannya banyak dijadikan rujukan oleh Saudi juga menyatakan bahwa “organisasi apa pun yang dibangun dengan asas Islam yang *shahih*, yang hukum-hukumnya diambil dari Kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh *salafush shalih* (Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Sahabat-Sahabat beliau), maka organisasi apa pun yang dibangun atas dasar ini tidak ada alasan untuk mengingkarinya.” Beliau juga menyatakan bahwa saling tolong-menolong adalah termasuk tujuan yang disyariatkan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, murid dari Syaikh bin Baz juga menyatakan bahwa jika organisasi tersebut berasal dari *waliyul amr* (pemimpin negara), maka wajib menaati apa yang dia

²⁴ Cambridge Dictionary, “Aid Agency”. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/aid-agency>

perintahkan. Karena ia adalah wakil dari *waliyul amr*, yang wajib ditaati selain dalam perkara maksiat kepada Allah.”²⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa organisasi Islam internasional, atau dalam konteks ini organisasi kemanusiaan, adalah organisasi yang berlandaskan pada Islam. Adapun struktur dan tata cara pelaksanaannya masuk pada perkara yang tidak membedakan antara organisasi Islam dengan organisasi lainnya

Konsep-konsep ini akan digunakan dengan kerangka pemikiran bahwa *at-takaful al-ijtima'i* sebagai sebuah cabang dari Ekonomi Islam adalah sebuah upaya yang diterapkan syariat dalam menjaga *maqashid asy-syari'ah* dan dalam konteks ini dijalankan oleh Negara Islam sebagai penjaga dari *maqashid* yang diaplikasikan dalam bentuk bantuan luar negeri di bidang kemanusiaan melalui organisasi kemanusiaan yang berlandaskan Islam.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode kualitatif. Pada dasarnya metode kualitatif mengacu kepada penelitian yang dimana datanya sendiri diambil dari wawancara, dokumen-dokumen yang berkaitan, audio-visual

²⁵ Yulian Purnama, “Hukum Organisasi dan Taat pada Pimpinan” *Muslim.or.id*.
<https://muslim.or.id/21379-hukum-organisasi-dan-taat-pada-pimpinan-organisasi.html>

dan observasi lapangan.²⁶ Dengan metode ini penulis akan mencoba untuk mendeskripsikan situasi yang ada dalam pembahasan dengan mengacu pada kerangka yang telah dipaparkan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengkaji permasalahan ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini pengambilan data akan bertitik berat pada riwayat bantuan luar negeri yang diberikan Saudi pada periode kepemimpinan Raja Salman melalui badan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center terhadap Yaman. Penulis akan mencoba untuk mengumpulkan data terkini yang terkait dengan masalah yang dibahas. Hal ini akan dilakukan dengan pengambilan data melalui berbagai macam sumber seperti koran, internet, serta buku-buku dan literatur yang dapat mendukung penelitian. Bila dirasa perlu, penulis juga akan melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait.

Peneliti juga akan melakukan riset mengenai pandangan Islam dalam pengentasan kemiskinan, bantuan kemanusiaan, dan terkhusus isu *humanitarian aid*, melalui penelitian kepustakaan dari bidang tersebut.

²⁶ Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-3. 3rd. Thousand Oaks: SAGE Publications. Hlm. 15.

1.7 Sistematika Pembahasan.

Pembahasan terdiri atas 4 bab. Yaitu Bab 1 pendahuluan, Bab 2 sampai 4 pembahasan dan kesimpulan.

Pada Bab 1, akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian ini, menjelaskan kerangka pemikiran sebagai acuan penelitian dan pada dasarnya menjelaskan masalah atau isu yang akan dikaji.

Bab 2 akan membahas mengenai gambaran umum dari kiprah Arab Saudi sebagai negara Islam dalam bantuan kemanusiaan, dan bantuan kemanusiaannya terhadap Yaman sebagai latar dari penelitian di Bab 3.

Bab 3 penulis akan membahas mengenai bantuan luar negeri dari Arab Saudi melalui KSRelief terhadap Yaman menggunakan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bab 4 penulis akan menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian.